

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kewenangan Otonomi Khusus Provinsi Papua

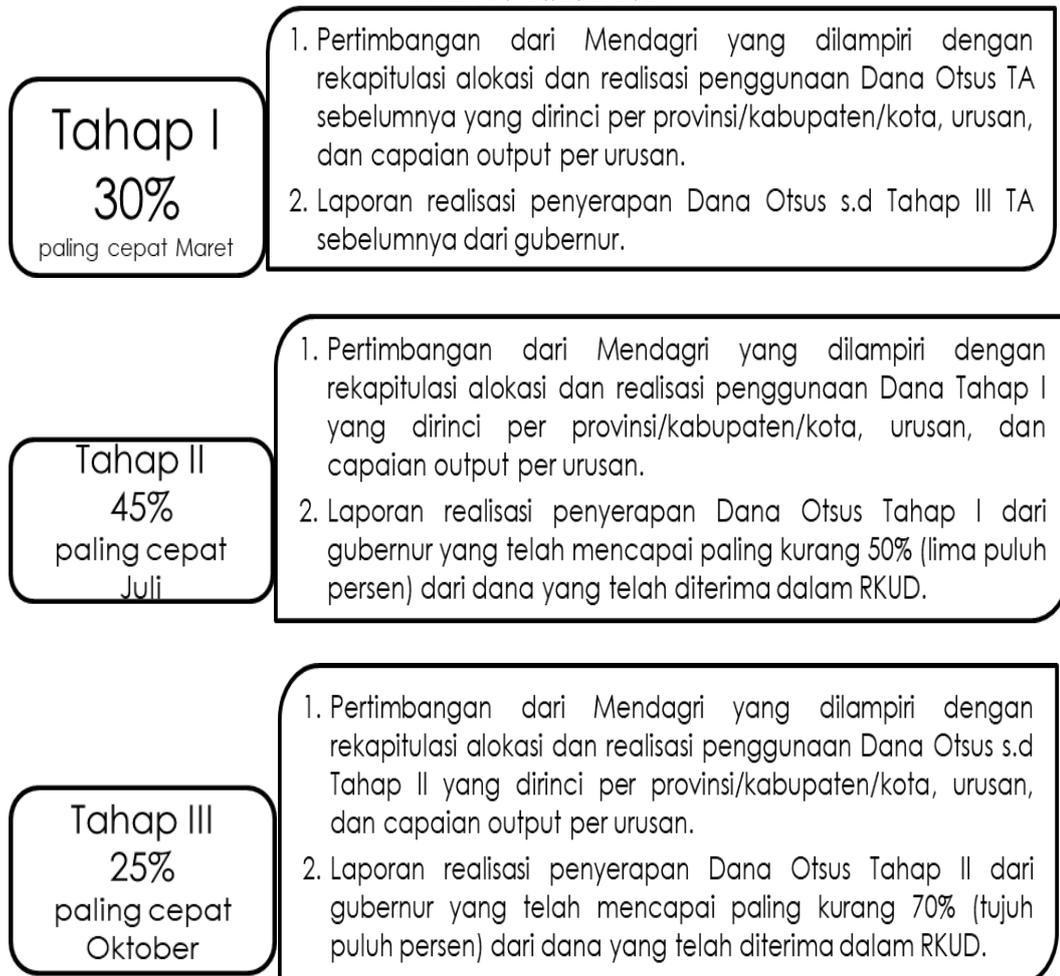
Provinsi Papua merupakan Provinsi yang mempunyai ke khususan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan mengenai penetapan Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus dapat dipandang sebagai salah satu bentuk aktualisasi dari adanya perubahan paradigma baru dalam penanganan persoalan-persoalan di Papua. Kebijakan pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari NKRI pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua itu sendiri. Pemberian hak otonomi khusus bagi Provinsi Papua menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sejatinya merupakan sebuah kebijakan khusus strategis yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

Pada hakikatnya, di dalam kebijakan khusus ini merupakan cerminan sebuah komitmen pemerintah dalam mengatasi dan mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan pembangunan antara Provinsi Papua dengan Provinsi-Provinsi lainnya di wilayah NKRI. Selain itu, dengan adanya kebijakan khusus strategis ini diharapkan nantinya akan semakin membuka peluang besar bagi masyarakat Papua untuk serta serta secara aktif sebagai subyek utama dalam seluruh proses

penyelenggaraan pemerintahan dan tata pelaksanaan pembangunan menuju taraf hidup yang sejahtera bagi masyarakatnya di Provinsi Papua.

Adapun tahapan kebijakan penyaluran dana otsus yang dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan, yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatannya terkait dengan pemberian hak khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yakni sebagai berikut:

Bagan 2.1
Tahap Kebijakan Penyaluran Dana Otsus Tahun 2017
PMK 50 Tahun 2017



Sumber Data: *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia*

Pengaturan kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk: 1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; 2) Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; 3) Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin keutuhan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) Menciptakan pemerintahan yang baik (PMK, 2017). Pemerintah Daerah Provinsi Papua telah mendapatkan alokasi dana otonomi khusus dari Pemerintah dalam rangka implementasi kewenangan otonomi khusus sejak tahun 2001 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2001 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, bahwa yang dimaksud dengan dana otonomi khusus yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan khusus dan merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi untuk tahun 2017 sendiri mendapatkan anggaran dari pemerintah Provinsi berkaitan dengan alokasi dana otonomi khusus adalah sebesar Rp 98.877.880.000,00. Selanjutnya rincian program dan kegiatan yang di danai oleh Dana Otonomi Khusus tahun 2017 antara lain pembagian penerimaan dana otonomi khusus setelah terlebih dulu dikurangi dengan pembiayaan untuk Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) dan Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota untuk pendidikan dan kesehatan, dibagi dengan proporsi 20% (dua puluh persen) dan 80% (delapan puluh persen) untuk kabupaten/kota se Provinsi Papua. Pembagian dana otonomi khusus sebesar 80% (delapan puluh persen) dialokasikan kepada kabupaten/kota berdasarkan alokasi

dasar dan alokasi variabel. Adapun secara substansial, peruntukan dana otonomi khusus 80% (delapan puluh persen) kabupaten/kota dialokasikan untuk:

1. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh persen) yang penganggarnya untuk membiayai PAUD, Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
2. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas persen) yang penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
3. Pembiayaan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan minimal 20% (dua puluh persen) yang mana penganggarnya dialokasikan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan sembilan bahan pokok, dana bergulir, dan pengembangan komoditi unggulan yang ada;
4. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh persen) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih, dan telekomunikasi;
5. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam persen);

6. Membiayai perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 4 % (empat persen).

Demi tertib dan kelancaran pengelolaan dana otonomi khusus bupati/walikota wajib membuat pedoman teknis pelaksanaan program yang dijalankan di kabupaten/kota yang menggunakan dana otonomi khusus diatur dengan peraturan bupati/walikota. Dimana untuk besaran dana otonomi khusus yang dilaokasikan ke pada Kabupaten Sarmi tercantum di dalam realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Sarmi. Berikut adalah merupakan realisasi pendapatan dan realisasi belanja pemerintah Kabupaten Sarmi tahun 2017 menurut jenis pendapatan dan jenis belanja:

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sarmi Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2017

No	Jenis Pendapatan	Besaran (ribu rupiah)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.092.657
1.1	Pajak Daerah	1.082.535
1.2	Retribusi Daerah	405.607
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah	73.349
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	3.531.166
2	Dana Perimbangan	883.039.207
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	33.872.627
2.2	Dana Alokasi Umum	715.028.866
2.3	Dana Alokasi Khusus	134.137.714
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	217.297.162
3.1	Pendapatan Hibah	18.000.000
3.2	Dana Darurat	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	4.612.401
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174.678.134
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	14.626.930
3.6	Pendapatan Lainnya	5.379.697
	Jumlah/Total	1.105.429.026

Sumber Data: *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarmi*

Tabel 2.2
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sarmi Menurut Jenis Belanja Tahun 2017

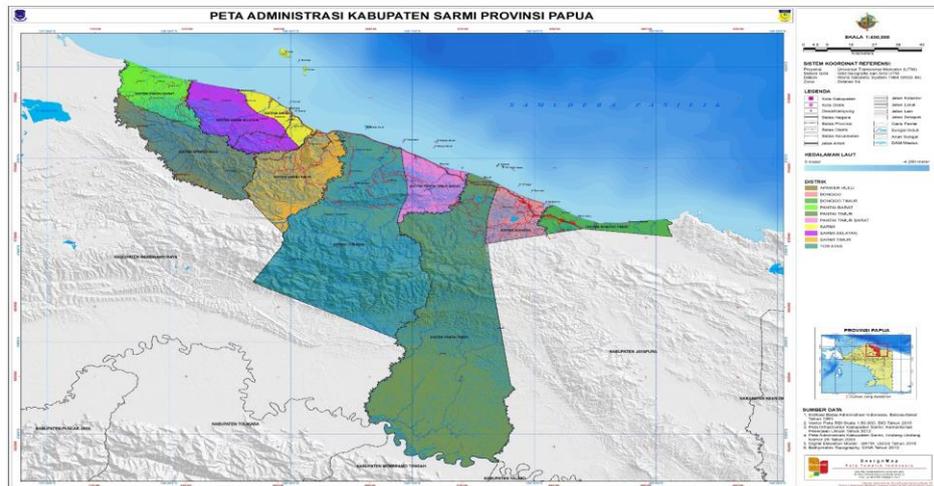
No	Jenis Pendapatan	Besaran (ribu rupiah)
1.	Belanja Tidak Langsung	384.218.730
1.1	Belanja Pegawai	175.635.483
1.2	Belanja Bunga	0
1.3	Belanja Subsidi	0
1.4	Belanja Hibah	36.776.765
1.5	Belanja Bantuan Sosial	32.430.547
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	0
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	136.375.935
1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000
2	Belanja Langsung	667.284.049
2.1	Belanja Pegawai	105.143.512
2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.361.437
2.3	Belanja Modal	251.779.100
	Jumlah/Total	1.051.502.779

Sumber Data: *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarmi*

Pada tabel diatas menunjukkan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sarmi tahun 2017 sebesar 1.105.429.026 ribu rupiah, dimana realisasi pendapatan asli daerah sebesar 5.092.657 ribu rupiah, dana perimbangan 883.039.207 ribu rupiah dan pendapatan sah lainnya sebesar 217.297.162 ribu rupiah.

B. Gambaran Umum Kabupaten Sarmi

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sarmi



Sumber Data: *Geoportal Kabupaten Sarmi*

1. Profil Kabupaten Sarmi

Kabupaten Sarmi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua yang terletak di sebelah utara Papua dengan luas sekitar 1.797.000 ha. Pada awal pembentukannya, Kabupaten Sarmi terbagi menjadi 8 distrik/kecamatan dengan Distrik Sarmi sebagai ibukota kabupaten. Namun setelah mengalami pemekaran sejumlah distrik, kini Kabupaten Sarmi memiliki 19 distrik. Kabupaten Sarmi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Papua, yang dimekarkan dari Kabupaten Jayapura pada tanggal 8 April Tahun 2003 yang berjarak 450 km dari ibukota Provinsi Papua.

2. Kondisi geografis

Kabupaten Sarmi secara geografis terletak di 138°05' Bujur Timur - 140°30' Bujur Timur dan 1°35' Lintang Selatan - 3°35' Lintang Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 17.740 km². Wilayah Kabupaten Sarmi sendiri

berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, kabupaten Tolikara di sebelah Selatan, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Mamberamo Raya di sebelah Barat, dan Kabupaten Jayapura di sebelah Timur dengan luas daerah sekitar 1.797.000 ha, Kabupaten Sarmi terbagi menjadi 8 distrik/kecamatan dengan Distrik Sarmi sebagai ibu kota kabupaten. Namun setelah mengalami pemekaran sejumlah distrik, kini Kabupaten Sarmi memiliki 19 distrik.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sarmi Tahun 2017

Kecamatan	Luas	Presentase
Pantai Barat	810	4,49
Sarmi	419	2,32
Tor Atas	1988	11,02
Pantai Timur	1.794	9,95
Bonggo	385	2,13
Apawer Hulu	779	4,32
Sarmi Timur	222	1,23
Sarmi Selatan	302	1,68
Pantai Timur Bagian Barat	2.455	13,61
Bonggo Timur	863	4,79
Sobey	127	0,70
Muara Tor	782	4,34
Ismari	1.687	9,35
Ve'en	1.829	10,14
Sungai Biri	1.427	7,89
Bonggo Barat	308	1,71
Verkam	649	3,60
Apawer Hilir	578	3,21
Apawer Tengah	635	3,52
Jumlah	18.034	100,00

Sumber Data: *Bagian Pemerintahan Kabupaten Sarmi*

3. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk di Kabupaten Sarmi sebanyak 37.511 jiwa yang terbagi kedalam 19 distrik, Penduduk di Kabupaten Sarmi tersebar di kota dan desa dengan pola tinggal tersebar di kampung-kampung kecil dan juga budaya atau adat-istiadat

yang masih sangat kuat, hal tersebut yang merupakan salah satu kendala yang harus dihadapi pemerintah daerah jika berbicara mengenai hal-hal yang harus dilakukan terkait kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Sarmi itu sendiri.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Sarmi Tahun 2017

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pantai Barat	1 304	1 222	2 527
2.	Sarmi	7 030	5 913	12 942
3.	Sarmi Timur	915	824	1 738
4.	Sarmi Selatan	1 079	919	1 998
5.	Tor Atas	994	926	1 920
6.	Pantai Timur	1 245	1 132	2 377
7.	Pantai Timur Barat	2 178	1 977	4 155
8.	Bonggo	2 338	1 977	4 315
9.	Bonggo Timur	1 662	1 519	3 181
10.	Apawer Hulu	826	817	1 644
Total		20 395	17 815	38 210

Sumber Data: *BPS Kabupaten Sarmi*

Penduduk Kabupaten Sarmi berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 38.210 jiwa yang terdiri atas 20.395 jiwa penduduk laki-laki dan 17.815 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Sarmi mengalami pertumbuhan sebesar 1,86 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Sarmi tahun 2017 adalah 114,48, yang berarti terdapat 114 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sarmi sampai dengan tahun 2017 mencapai 2,12 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang.

C. Kemiskinan di Kabupaten Sarmi

Presentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarmi menurut Data Pusat Statistik tahun 2017 adalah sebesar 13,75 persen dimana dalam presentase tersebut merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan daerah pesisir yang ada di Provinsi Papua lainnya terlebih Kabupaten Sarmi merupakan Kabupaten yang letak administratifnya tidak begitu jauh dari ibukota Provinsi, dengan letaknya tersebut seharusnya merupakan sebuah keuntungan karena dengan keadaan yang demikian memberikan kemudahan pada akses atau mobilisasi dari ibu kota Provinsi yang merupakan pusat perekonomian terbesar di Provinsi Papua. Sehingga dimungkinkan untuk berdampak dengan cepat perkembangannya seperti yang terjadi di Ibu Kota Provinsi baik dari aspek perekonomian maupun aspek sosial salah satunya tingkat kemiskinan, namun hal tersebut sepertinya belum berjalan dengan baik dan semestinya.

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kabupaten Sarmi hanya mengandalkan hasil pertanian. Hasil pertanian tidak cukup untuk membiayai hidup masyarakat. Karena masyarakat di Kabupaten Sarmi tidak memiliki cukup keahlian lainnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan tingkat pendidikan di Kabupaten Sarmi umumnya masih rendah karena rata-rata masyarakat hanya lulusan SMP atau SD saja. Semenjak adanya bantuan DPKK pihak pemerintah Kabupaten melakukan pembangunan dari segi fisik atau pun non fisik, yang diharapkan berguna untuk masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup dari segi SDM, infrastruktur dan ekonomi. Misalnya dalam hal pembangunan infrastruktur dasar hal ini dilakukan agar mempermudah akses antar daerah, selain

itu pemerintah Kabupaten juga mendirikan sekolah kampung, dengan keberadaan sekolah kampung ini diharapkan dapat menjawab persoalan terkait minimnya tingkat pelayanan Pendidikan di daerah-daerah pedalaman yang memiliki keterbatasan akses, serta memberi bantuan kepada siswa-siswi seperti bantuan seragam dan buku bacaan. Karena berawal dari anak yang cerdas maka masa depan akan cerah, siswa-siswi juga bersemangat untuk sekolah. Sedangkan dalam peningkatan sektor ekonomi pemerintah melakukan kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh bantuan modal usaha yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM melalui lembaga pemberdayaan mikro.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sarmi Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Presentase
2011	36.073	6.800	19,42
2012	36.348	6.600	18,82
2013	36.541	6.300	17,72
2014	36.965	4.800	13,32
2015	37.002	5.050	13,85
2016	37.697	5.130	13,74
2017	38.210	5.230	13,75

Sumber Data: *Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik Kab Sarmi*